

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah sistem politik Indonesia dapat dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun, dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia, tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya didalamnya terdapat interaksi fungsional dengan suatu lingkungan, yaitu proses aliran yang berputar untuk menjaga eksistensinya. Lingkungan yang dimaksud di sini dengan merujuk pendapat Almond, adalah ada dua lingkungan, yaitu lingkungan domestik dan lingkungan internasional yang saling mempengaruhi. Karena itu suatu sistem politik tidak pernah hidup dalam ruang hampa. Dengan demikian, sistem politik merupakan sistem terbuka, artinya dikelilingi oleh lingkungan internal maupun eksternal yang memiliki tantangan dan tekanan dan pula di harapkan suatu sistem politik dapat berhasil untuk menjawab tantangan kedua lingkungan tersebut. Keberhasilan sistem politik dalam menghadapi tantangan tersebut, tergantung pada kapabilitas (kemampuan) sistemnya. Oleh karena itu, sesuai latar belakang tersebut, kami akan mencoba memberikan pemahaman mengenai kapabilitas sistem politik indonesia sesuai rumusan masalah yang tertuang di makalah ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa Pengertian Kapabilitas Sistem Politik Indonesia?
2. Apa saja klasifikasi kapabilitas sistem politik?
3. Bagaimana Analisis dan perbandingan empirik kapabilitas sistem politik Indonesia pada masa orde baru, dan reformasi?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Pengertian Kapabilitas Sistem Politik Indonesia.
2. Untuk mengetahui klasifikasi kapabilitas sistem politik.
3. Untuk mengetahui Analis dan perbandingan empirik kapabilitas sistem politik Indonesia pada masa orde baru, dan reformasi.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Kapabilitas Sistem Politik Indonesia

Kapabilitas sistem politik adalah kemampuan sistem politik dalam menghadapi tantangan, dinamika dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu Negara. Adapun pengertian lain dari kapabilitas system politik adalah kemampuan system politik dalam bidang ekstraktif (kemampuan eksplorasi sumber daya alam dan juga manusia), distributive (kemampuan eksplorasi SDA dan SDM), regulative (kemampuan menyusun undang-undang, mengatur serta mengawasi dan mengendalikan tingkah laku individu, kelompok, organisasi, perusahaan dll. Sehingga dapat patuh dan taat kepada undang-undang yang berlaku), simbolik (Kemampuan untuk membangun pencitraan terhadap kepala negara atau juga rasa bangga terhadap negaranya), responsif (kapabilitas untuk menciptakan daya tanggap kepada masyarakat), dan dalam negeri serta internasional (Hubungan interaksi dengan luar negeri) untuk mencapai tujuan nasional seperti dalam pembukaan UUD'45.

Kapabilitas suatu sistem politik adalah kemampuan sistem dalam menjalankan fungsinya dalam rangka keberadaannya dalam lingkungan yang lebih luas.¹ Menurut Gabriel Almond (dalam cantori, 1974), konsep kapabilitas sistem politik merupakan “*a way of characterizing the performance of the political system and of change in performance, and of comparing political system according to their performance*”. Penggunaan konsep kapabilitas akan berguna jika kita hendak melihat bagaimana kinerja sebuah sistem politik, termasuk bagaimana perubahan-perubahan dalam kinerja mereka. Konsep kapabilitas juga penting ketika kita hendak membandingkan sistem politik berkenaan dengan kinerjanya.²

¹ Kantaprawira, Rusadi. *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru, Cetakan Ke 5, 2006, hlm 50

² Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia: pemahaman secara teoritik dan empirik*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada), 2012, hlm.300

2.2 Klasifikasi Kapabilitas Sistem Politik

Almond menyebutkan enam kategori untuk menentukan kapabilitas suatu sistem politik. Kapabilitas suatu sistem politik merupakan kemampuan sistem politik dalam mengatasi pengaruh lingkungan dalam atau luar terhadap dirinya (1) kapabilitas ekstraktif, misalnya mengumpulkan sumber-sumber alami dan manusiawi; (2) kapabilitas regulatif, misalnya arus kontrol dari sistem politik tersebut terhadap kelompok atau individu; (3) kapabilitas distributif, misalnya alokasi barang, jasa, kehormatan, status dan kesempatan kerja; (4) kapabilitas simbolik, misalnya pameran kekuatan dari kekuasaan pada saat kritis; (5) kapabilitas responsif, misalnya menyangkut hubungan antara input dari masyarakat dengan output yakni kebijaksanaan dari sistem politik; (6) kapabilitas domestik dan internasional. Penjelasan dari setiap kapabilitas itu adalah sebagai berikut:

2.2.1 Kapabilitas Ekstraktif

Kapabilitas Ekstraktif yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam mengumpulkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) dari lingkungan domestik maupun internasional. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan (batu bara, emas, timah, dan lain-lain) yang ketika datang para penanam modal domestik maupun internasional itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian akan menghidupkan roda pemerintahan dan pembangunan.

2.2.2 Kapabilitas Distributif

Kapabilitas distributif, yaitu ukuran kinerja sistem politik yang ada kaitannya dengan kemampuan dalam mengolah SDA sedemikian rupa yang dimiliki oleh masyarakat dan negara dan hasilnya menjadi pemasukan bagi anggaran pemerintah pusat maupun daerah, dan penggunaannya di distribusikan secara merata kepada masyarakat yang disesuaikan dengan rupa-rupa kebutuhan masyarakat, misalkan untuk kelompok petani, nelayan, pengusaha kecil, buruh, keagamaan, militer, pegawai negeri, industri, elit politik, dan lain-lain. Demikian

pula kemampuan pengelolaan berbagai macam pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali di distribusikan secara merata kepada masyarakat, misalnya dalam bidang kesehatan, untuk membantu kesehatan kelompok masyarakat miskin maka diadakan gratis berobat kerumah sakit melalui program jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat) dan di daerah ada jamkesda (jaminan kesehatan daerah). Dalam bidang pendidikan ada program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk membantu sekolah negeri maupun swasta, maupun beasiswa yang tidak mampu. Dalam bidang ekonomi, memberikan bantuan modal kepada pengusaha kecil dan sebagainya. Selain itu, juga di distribusikan benda-benda abstrak, seperti status, kehormatan, penghargaan, kepahlawanan.

2.2.3 Kapabilitas Regulatif

Kapabilitas Regulatif (Pengaturan), yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam menyelenggarakan pengawasan tingkah laku individu dan kelompok yang ada di dalamnya, Kemampuan sistem politik untuk mengendalikan atau mengatur tingkah laku individu atau kelompok yang berada dalam sistem. Caranya adalah dengan menerapkan peraturan-peraturan tertentu.³ Maka dibutuhkan adanya pengaturan. Misalnya, dalam bidang ekonomi, bagaimana pemerintah dapat melakukan pengaturan agar sistem ekonomi tidak dimonopoli oleh segelintir kelompok orang, sehingga menimbulkan ketidakadilan; bagaimana pemerintah dapat menetapkan upah minimum regional (UMR) yang mengutamakan pekerja. Dengan demikian, di dalam negara demokrasi dalam keabsahan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar ini perlu diuji, misal melalui hak penguji materiil atau yudicial review oleh mahkamah konstitusi terhadap undang-undang dan produk dibawahnya. Dengan pengujian tersebut diharapkan daya pengaturan yang memiliki potensi bertentangan dengan asas keadilan dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dapat dicegah, sehingga tindakan kesewenang-wenangan dari pemerintah dapat dihindari.

³ Almond, Gabriel and James S. Coleman. (1960). The Politics of Developing Area. Princeton: Princeton University Press.hlm.50

2.2.4 Kapabilitas Simbolik

Kapabilitas simbolik, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam kemampuan mengalirkan simbol dari sistem politik kepada lingkungan intra masyarakat maupun ekstra masyarakat. Kapabilitas simbolik dapat di bedakan dengan output simbolik. Outpun simbolik misalnya pameran kekuatan dan upacara militer, kunjungan pejabat tinggi. Selain itu, pernyataan kebijakan para pejabat politik yang di hubungkan dengan kepercayaan, kelakuan, dan aspirasi rakyat juga merupakan output simbolik yang bertujuan agar kebijakan yang dikemukakan menjadi efektif. Ukuran output simbolik dapat dilihat dari jumlah kerumunan massa yang hadir pada suatu acara dan applaus massa yang lama tanda setuju atas pidato pemimpin tersebut misalnya, adalah dapat menjadikan indikator bagi output simbolik ini. Sebaliknya, indikator menurunnya output simnolik ini dapat dilihat dari melunturnya kewibawaan seseorang pemimpin atau beberapa elit politik sehingga tingkat kepercayaan masyarakat semakin merosot. Akibatnya, seseorang pemimpin sering diperlakukan kurang baik, diejek, diperolok-olok, dikritik, bahkan secara ekstrem dibakar fotonya, monumen patung pemimpin tersebut diruntuhkan, buku biografinya dibakar, bahkan pidato-pidatonya yang disiarkan di TV atau Radio tidak mau didengarkan. Mungkin kita masih ingat dengan peristiwa jatuhnya rezim orde baru, yang semula presiden soeharto begitu berwibawa, berkuasa dan dipuji, dan kebijaaan-kebijakannya diikuti sampai awal tahu 1998, namun setelah itu ia dicaci maki, dihina, fotonya dibakar, dan demonstrasi dimana-mana yang menghendaki ia diturunkan dari jabatan kepresidenan, dan akhirnya dapat juga dijatuhkan.

2.2.5 Kapabilitas Responsif

Kapabilitas Responsif, yaitu ukuran kinerja sistem politik yang merujuk seberapa besar daya tanggap suatu sistem politik terhadap setiap tekanan yang berupa tuntutan baik dari lingkungan intra masyarakat (domestik) maupun ekstra masyarakat (internasional). Karena itu, didalam suatu sistem politik, bahwa kapabilitas responsif ini ditentukan oleh hubungan antara input dan output. Hal ini

berbeda dengan kapabilitas ekstratif, regulatif, distributif, dan simbolik berhubungan dengan pengambilan pola-pola output sistem politik kedalam lingkungan intra masyarakat (domestik) maupun ekstra masyarakat (internasional). Sedangkan kapabilitas responsif lebih kepada merupakan persoalan input sistem politik yang berasal dari lingkungan intra masyarakat (domestik) maupun ekstratif masyarakat (internasioanl) serta output.

Kapabilitas responsive merujuk kepada kemampuan system politik ke dalam lingkungan internal dan eksternal, maka kapabilitas responsive merujuk kepada kemampuan system politik untuk menangkap tuntutan-tuntutan yang berasal dari masyarakat dan lingkungan internasional.⁴

Dalam konteks ini, derajat kepekaan sistem politik yang bersifat tanggap (responsif) tersebut masih tergantung pada sistem politik yang diterapkan oleh suatu negara. Misalnya, apabila suatu negara menggunakan sistem kerajaan birokratik, maka tentu segala aktifitas politik pengendaliannya berada pada tangan raja beserta para pembantu dilingkaran terdekatnya. Dalam kondisi demikian, sangat sedikit melibatkan diri pada tuntutan dan tekanan yang datang dari sumber-sumber asing yang berada diluar lingkaran dalamnya (inner circle). Oleh karena itu, elite politik sangat terikat pada satu-satunya sumber input politik, sehingga boleh dikatakan tingkat kapabilitas responsif sistem politik tersebut rendah (low responsive capability). Dalam kondisi tertentu, dampak daya tanggap yang rendah terhadap input yang berupa tuntutan publik tersebut, maka seringkali melahirkan motivasi massa untuk melakukan tindakan politik yang berupa demonstrasi, yaitu sebagai ungkapan aspirasi mereka (massa) secara langsung kepada pemerintah agar dapat memberikan tanggapan yang memuaskan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka.

Lain halnya, dengan sistem politik yang selalu membuka diri seluas-luasnya untuk mendapatkan input (masukan) dari sumber luar, seperti dari kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan partai politik, maka mencerminkan sistem politik tersebut memiliki kapabilitas responsif yang tinggi (high responsive

⁴ Yantos, *Sistem politik Indonesia*, Solo: Pustaka Itizam, 2014, hlm. 36

capability). Dalam kondisi sistem politik yang responsive tersebut, maka biasanya yang lahir adalah tuntutan yang bersifat dukungan (support) terhadap implementasi kebijakan yang di gulirkan pemerintah misalnya. Tidak ada penentang yang berarti terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah, karena kebijakan tersebut dirasakan telah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan rakyat.

2.2.6 Kapabilitas Dalam Negeri dan Luar Negeri

Kapabilitas dalam negeri dan Luar Negeri, yaitu ukuran kinerja sistem politik yang merujuk bahwa sejauh mana kapabilitas suatu sistem politik dapat berinteraksi dengan lingkungan domestik dan lingkungan internasional. Bahkan sekarang ini dengan adanya kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan transportasi, maka telah membuat batas-batas teritorial negara semakin tipis, sehingga mendorong kita memasuki wilayah dunia luar yang ditata dalam tatanan baru yang saling terkait, yang dapat dilihat dari semakin bersatunya dunia baik secara fisik maupun emosional. Kenichi Ohmae (1991) menyebutnya sebagai “the borderless world”----dunia tanpa tapal batas. Sebuah zaman baru yang sering disebut era globalisasi. Kapabilitas ini mencakup kegiatan atau tindakan yang terkait dengan perdagangan internasional, penetrasi politik ke negara lain, misalnya lobi politik Yahudi di Amerika, IMF, pinjaman luar negeri.

Kapabilitas domestik dan internasional yaitu memperlihatkan keberadaan suatu sistem politik dalam lingkungan domestik maupun internasional. Kemampuan domestik dan internasional, sistem politik masih lemah sehingga relasi antara pemerintah dan masyarakat kurang harmonis, terlihat dari berbagai aksi ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah sedangkan dalam internasional pemerintah sangat mengedapkan jalinan relasi dengan baik dengan

memberikan kebebasan untuk berinvestasi dengan mengorbankan masyarakatnya sendiri.⁵

Melihat pemahaman seperti yang disebutkan diatas, maka kita sepakat bahwa globalisasi telah memberikan pengaruh bagi suatu sistem politik. Artinya sebuah negara tidak bisa lagi sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal, sehingga kapabilitas domestik dari suatu sistem politik sedikit banyak akan dipengaruhi oleh kapabilitas internasionalnya. Misalnya, pengaruh yang datang dari lingkungan internasional yang menyangkut ekonomi, yaitu munculnya tekanan-tekanan global yang mengarah pada menciptakan liberalisasi ekonomi. Akibatnya, pemerintah dengan “terpaksa” harus menerapkan kebijakan pasar bebas, yaitu dengan meliberalisasi perdagangan dan keuangan dengan membuka pasar pada dunia, melakukan “privatisasi” terhadap perusahaan-perusahaan yang dimiliki publik, melakukan regulasi dengan mengalihkan negara sebagai peran penentu kebijakan, dan sebagainya. Tak heran negara-negara berkembang seperti indonesia menghadapi kekuatan “raksasa” ekonomi internasional yang digulirkan oleh negara-negara maju (barat) dengan agenda program ekonomi politik liberalisasi melalui tiga lembaga keuangan, seperti WTO, bank Dunia, dan IMF.

WTO (world trade organization) sebagai organisasi perdagangan internasional internasional yang mempunyai tugas dapat memecahkan masalah-masalah perdagangan internasioanal, dan memiliki otoritas yang besar, termasuk dalam menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang melakukan pelanggaran prinsip-prinsip perdagangan internasional. Bank Dunia (Worl Bank) adalah lembaga bank yang bergerak untuk membangun dan mengatasi kemiskinan, sedangkan international moneter fund (IMF) dana moneter internasioanal bertanggung jawab terhadap stabilitas moneter internasioanal dan persoalan-persoalan keuangan. Sekarang ini ketiga lembaga tersebut telah memiliki kekuatan ekonomi politik internasioanl yang luar biasa, maka tak heran dalam praktiknya

⁵ Toni Adrianus Pito, dkk, *Pengenalan Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Banda Aceh: Nuansa Cendikia 2006: hlm 74-76

memcampuri atau intervensi dalam menentukan kebijakan pemerintah suatu negara, sehingga tak heran ketiga lembaga tersebut sering disebut sebagai lembaga governance global yang memiliki kekuasaan yang super didunia ini.

Misalnya yang dikatakan Soeging Sarjadi,dkk.(2006), bahwa ketika Indonesia mengalami krisis moneter yang menghantam sekitar tahun 1997, maka presiden Soeharto kala itu mengundang IMF untuk membicarakan paket bantuan dan agenda kebijakan yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dengan ditandatangani letter of intent (LoI) pertama. Karena dirasakan kurang berhasil dalam mengatasi resesi ekonomi Indonesia, maka ditandatangani lagi nota kesepakatan (LoI) yang kedua pada Januari 1998. Dalam hal ini IMF menyodorkan persyaratan yang lebih berat lagi, yaitu Indonesia harus mematuhi 130 persyaratan paket pembaruan meliputi restruktisasi korporasi (pelaku sektor usaha), privatisasi<deregulasi bidang perkebunan, tekstil, minyak sawit, dan operasi bulog, undang-undang baru untuk investasi, minyak gas, dan air, reformasi hukum, pemilihan umum, desentralisasi, dan pemulihan ekonomi, serta pembentukan kondisi pemberantasan Korupsi (KPK).

2.3 Analisis dan Perbandingan Empirik Kapabilitas Sistem Politik Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi

2.3.1 Era Orde Baru

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998.

Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru diantaranya adalah:

- a. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS\$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS\$1.000
- b. Sukses transmigrasi
- c. Sukses KB
- d. Sukses memerangi buta huruf

Sedangkan kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru diantaranya adalah:

- a. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
- b. Pembangunan Indonesia yang tidak merata
- c. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
- d. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
- e. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel

Menurut Liddle dalam artikel "Warisan Buruk Orde Baru" (hal 92), mengatakan bahwa Sistem politik Orde Baru dibangun atas dasar otoriterisme. Lembaga-lembaga legislatif, partai, pemilu, ormas, pers, dan hampir semua organisasi yang berpotensi mengancam kedudukan pemerintah dikuasai dan dikekang oleh Presiden Soeharto dan bawahan-bawahannya.

1. Penyaluran input: Rendah banyak pembatasan yang dilakukan oleh Rezim Orba.
2. Pemeliharaan nilai: banyak terjadi pelanggaran HAM. Beberapa yang terpublikasi: Peristiwa Malari, DOM Aceh, Kasus di Timor timur, 27 Juli, dll
3. Kapabilitas sistem: Yang paling menonjol adalah kapabilitas simbolik dan regulatif
 - a. Ekstraktif: Penyerapan SDM tidak berjalan dengan baik, mengingat hanya orang-orang di sekitar Soeharto yang bisa masuk ke lingkaran kekuasaan negara. SDA dieksploitasi secara masif atas nama pembangunan
 - b. Distributif: Trias politika tidak berjalan, Eksekutif (Soeharto) terlalu dominan, lembaga Legislatif dan Yudikatif merupakan kepanjangan tangan Soeharto
 - c. Regulatif: Regulasi dibuat hanya untuk membatasi potensi ancaman yang akan menggoyang sistem politik yang dibangun oleh Rezim Orde

Baru. Sistem Politik Orde Baru di sokong oleh 5 UU Politik : UU Pemilu (UU NO 1/1975), UU tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD (UU NO 2/1975), UU tentang partai politik dan Golkar (UU NO 3/1975), UU tentang referendum (UU NO 5/1985), dan UU tentang ormas(UU NO 8/1985). Konsep Dwifungsi ABRI oleh Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Birokrasi/PNS Berpolitik

- d. Simbolik: Responsif The smiling general, Bapak pembangunan
Responsif: Responsif “by design”

2.3.2 Era Reformasi

Semenjak Soeharto lengser dari kekuasaannya, lebih dari 13 tahun yang lalu Indonesia telah memasuki apa yang dikenal dengan sebutan “Era Reformasi”. Dalam khasanah ilmu politik sendiri, masa ini disebut sebagai masa transisi dari rezim otoritarianisme ke sebuah pembentukan rejim yang lebih demokratis. Untuk membangun momentum demokratik yang dimaksud, diperlukan adanya beberapa perubahan mendasar pada sistem politik, yang hanya dapat terwujud melalui serangkaian tindakan. Termasuk diantaranya adalah amandemen konstitusional. Isu-isu pokok yang diangkat untuk dikaji dan direformasi adalah:

- 1) Reformasi konstitusional dan perundang-undangan terhadap lembaga legislatif dan eksekutif untuk mendukung transisi demokrasi
- 2) Otonomi daerah untuk menjamin partisipasi politik yang inklusif dan administrasi publik yang efektif serta terselenggaranya pembangunan di seluruh Indonesia
- 3) Mendefinisikan kembali hubungan sipil-militer untuk menjamin supremasi badan-badan perwakilan yang pilih
- 4) Memberdayakan peran masyarakat sipil baik sebagai pengawas maupun sebagai penggerak pemerintahan demokratik
- 5) Meningkatkan partisipasi aktif para perempuan dalam politik dan masyarakat

- 6) Membicarakan tentang kesenjangan fundamental dan kegelisahan di dalam masyarakat yang diakibatkan oleh pergolakan sosio-ekonomi dan kecurigaan antar agama
- 7) Menjamin bahwa Konstitusi dan semua hukum yang disusun sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional
- 8) Indonesia harus meratifikasi semua konvensi internasional tentang hak asasi manusia
- 9) Menjamin bahwa Prinsip-Prinsip Arah Kebijakan Negara dan Piagam tentang Hak- Hak dan Kewajiban Mendasar Negara dan Warga Negara diikutsertakan dalam Konstitusi
- 10) Menjamin bahwa hak-hak tersebut tidak dipersingkat kecuali dalam kondisi-kondisi
 1. Penyaluran input: tinggi dan terpenuhi
 2. Pemeliharaan nilai: Penghargaan HAM tinggi
 3. Kapabilitas sistem:
 - a. Ekstraktif: Penyerapan SDA dan SDM mengikuti semangat otonomi daerah
 - b. Distributif: Trias politika berjalan lebih bagus,

Legislatif mempunyai kekuatan Fenomena Sistem politik Indonesia masa orde Baru yaitu memiliki ciri-ciri lembaga eksekutif yang kuat yang didukung oleh lembaga legislatif yang lemah. Hal ini disebabkan oleh adanya anggota-anggota yang di angkat dari kalangan militer dan golongan-golongan fungsional yang lebih memperjuangkan kepentingan eksekutif daripada kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Hal ini menyebabkan hilangnya kontrol institusional terhadap lembaga eksekutif. Konsep Perubahan adalah dipusatkan di sekitar komposisi lembaga legislatif yang paling cocok bagi Indonesia, dimana legislatif bisa mendapatkan kekuasaan untuk membuat aturan perundang-undangan disamping juga berfungsi sebagai pengawas tindakan lembaga eksekutif serta institusi-institusi pemerintah lainnya.

2.3.3 Perbandingan Empirik Kapabilitas Sistem Politik Indonesia Masa Orde Baru, Dan Reformasi

No	Kapabilitas	Orde Baru	Orde Reformasi
1	2	3	4
1	Kapabilitas Ekstraktif	Pemerintahan Orde baru memiliki kapabilitas Ekstraktif yang besar.karena itu pada tahun 1993, Indonesia menadapatkan pujian dari Bank dunia bahwa “Indonesia sebagai <i>East Asian MI</i>racle-dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7%”. Kemampuan rezimorde baru adalah selain kemampuan mengelola sumber-sumber ekstraktif dalam negeri, di antaranya dengan membangun infrastruktur pertanian, pertambangan, dll. Selain itu, juga membuka diri bagi sumber-sumber materill international, yaitu sejak tahun 1970-an melalui liberalisasi investasi dan perdagangan melalui paket-paket deregulasi membuat	Untuk menilai kinerja performance system politik pada masa reformasi perlu dilihat dari beberapa periode pergantian presiden enam kali, yaitu pergantian dari Soeharto ke BJ.habibie ke Abdurrahman Wahid “Gus dur”. Abdurrahman ke Megawati ke SBY (2 periode), dan SBY ke Joko Widodo. Oleh karena itu, sepanjang orde reformassi telah terjadi pergantian presiden sebanyak enam kkali, maka penilaian kapabilitas system politik reformasi akan dibatasi secara umum sepanjang pemerintahan presiden kelima, karena yang sekarang adalah peresiden Joko Widodo untuk periode 2013-2019 ketika buku dari makalah ini direvisi masa pemerintahan Presiden Jokowi baru berjalan dua bulan, jadi belum bisa diukur kinerjanya.

		masuknya investasi asing dengan masuknya investasi dengan cepat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan kemampuan ekstraktifnya yang baik, maka sudah dapat dianggap sukses dari program pembangunan pelitanya, program kb, transmigrasi, pemberantasan buta huruf, pengentasan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia. Namun, pada pertengahan 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga fondasi ekonomi yang sudah dibangun selama 32 tahun runtuh, hingga kini masih dirasakan dampaknya.	
2	Kapabilitas Distributif	Memang disayangkan, kemampuan ekstraktif dari rezim ORBA tidak diimbangi dengan kemampuan distributive. Pasalnya kesuksesan pelaksanaan pembangunan tidak serta merta membawa	<i>Kapabilitas Distributif pemerintah BJ. Habibie:</i> Tingkat kapabilitas Ekstraktif yang rendah, sehingga berimbas pada buruknya kapabilitas distributifnya, sehingga pada saat itu, masalah

	kemakmuran secara merata, namun yang muncul beberapa masalah, antara lain: 1. Semakin menganga jurang antara kelompok yang masyarakat kaya dan kelompok masyarakat yang miskin. Timbul gap antara yang kaya dan yang miskin. 2. Kesenjangan pendapatan antara daerah dan pusat 3. Kesenjangan regional 4. Kesenjangan investasi antara daerah, kesenjangan social antara satu daerah dengan daerah lain sangat terasa, misalnya pembangunan fisik di satu daerah terutama Jawa.	kesenjangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan tidak pernah mendapatkan perhatian secara serius. Biaya pendidikan semakin mahal sehingga hanya kelompok tertentu saja yang mampu mengakses, demikian pula dalam pelayanan kesehatan. <i>Kapabilitas Distributif pemerintah Gus Dur:</i> Ditengah kapabilitas ekstraktif yang rendah ditambah tidak adanya stabilitas politik, penuh konflik menyebabkan kapabilitas Gus Dur dianggap yang paling rendah. Akibatnya masyarakat semakin sengsara. <i>Kapabilitas Distributif pemerintah Megawati:</i> Tingkat kapabilitas ekstraktif masa pemerintahan Megawati pun tidak lebih baik, juga berimbas pada buruknya kapabilitas distributifnya. <i>Kapabilitas Distributif SBY</i> Kapabilitas distributif pemerintah SBY-JK relative
--	---	---

			lebih baik, meskipun tetap masih belum mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. <i>Kapabilitas Distributif pemerintah SBY-Boediono (2009-2014)</i> Didalam pemerintahan yang ke-2 ini, kapabilitas Distributif pemerintah SBY-Boediono belum menunjukkan adanya perubahan yang berarti. Jadi, selama reformasi yang sudah berlangsung hampir 12 tahun, dan adanya otonomi daerah tak mengubah nasib orang-orang miskin yang berada di pedesaan
3	Kapabilitas Simbolik	Rezim ORBA boleh dikatakan memiliki kapabilitas simbolik relatif baik, presiden Soeharto dan para elite politik pada saat itu telah mendesain kapabilitas simbolik melalui beberapa acara serimonial yang dapat memberikan dampak positif. Acara-acara serimonial tersebut antara lain: 1. Untuk memberikan kesan bahwa presiden	<i>Kapabilitas Simboli pemerintah BJ.Habibie:</i> Kapabilitas simbolik pemerintah B.J Habibie dapat dikatakan buruk, karena beliau sering menampilkan kelemahan dengan mengambil kebijakan yang tak peka dan tak populer di mata rakyat atau tak sesuai di mata rakyat. Misalnya, dilihat dari perilaku Nepotisme dimana dengan menaburkan bintang jasa

		Soeharto sebagai bapak pembangunan, beliau sering tampil setiap ada acara serimonial peresmian proyek pembangunan. 2. Untuk memberikan kesan bahwa presiden Soeharto perhatian pada lingkungan hidup maka selalu di adakan penyerahan Kalpataru oleh Presiden di Istana Negara.	kepada istri, adik, para sahabat dekatnya namun melawan arus rakyat dengan mengumumkan pemberian dana pengganti pembangunan rumah Soeharto di TMII sebesar 26,6 miliar rupiah ditengah rakyat menderita. Kapabilitas Simbolik pemerintah Gus Dur: Kapabilitas simbolik Gus Dur pun tidak lebih baik, karena perilakunya menampakkan ketidakpekaan, misalnya ditengah rakyat sedang berjuang denga kemiskinan akibat krisis yang tak kunjung selesai, malahan Gus Dur sering melawat kunjungan kenegaraan ke beberapa negara. Tentu perjalanan ini memakan biaya tinggi. Selain itu ketidakkonsistenan Gus Dur dalam menggulirkan kebijakan dalam pengelolaannegeri ini. Kapabilitas Simbolik pemerintah Megawati:
--	--	---	--

			Kapabilitass simbolik megawati pun tidak lebih baik, juga sering melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri, bahkan melakukan kunjungan keluar negeri hanya untuk keperluan keluarga. <i>Kapabilitas Simbolik pemerintah SBY-JK (2004-2009):</i> Tak lepas dari kritik pula, yang dianggap kurang memiliki kepekaan pula atas penderitaan rakyat miskin. Dilihat dari kebijakan yang kurang mencerminkan kehendak rakyat, seperti kenaikan BBM. <i>Kapabilitas Simbolik pemerintah SBY-Boediono (2009-2014):</i> Setiap detiknya sampai tulisan ini dibuat ternyata kapabilitas simboliknya masih belum menimbulkan rasa simpatik rakyat, terutama rakyat kecil. Ditengah tingkat kemiskinan masih tinggi, banyak kasus korupsi besar yang tak dapat
--	--	--	--

			diselesaikan dengan tuntas missal kasus “Bank Century”.
4	Kapabilitas Regulatif	Rezim Orba dalm mengoptimalkan kapabilitas regulatifnya yang diorientasikan adanya stabilitas politik untuk mendukung satbilitas pembangunan ekonomi relative baik. Namu,dalam beberapa kebijakannya sering bertentangan dengan system demokrasi, antara lain: 1. Untuk mengendalikan warga negara baik secara individu maupun kelompok terutama yang membangkang di dalam masyarakat dilakukan pengontrolan secara ketat, melalui cara pendisiplinan paksa. 2. Untuk membatasi partisipasi politik masyarakat pedesaan, rezim Orba membuat kebijakan yang kemudian dikenal dengan “<i>The floating mass</i>”I, yaitu membatasi kegiatan	<i>Kapabilitas Regulatif pemerintah B.J Habibie:</i> Setelah soeharto lengser, maka estapet kepemimpinan diserahkan kepada putra “Mahkota” B.J Habibie. Maka tidak heran Habibi dianggap sebagai kelanjutan ORBA, karena itulah legitimasi pemerintahan B.J Habibie lemah, yang terlihat dari dukungan yang rendah. Konsekuensinya, kapabilitas regulasinya pun menjadi rendah. <i>Kapabilitass Regulatif pemerintah Gus Dur:</i> Sebenarnya kapabilitass regulative pemerintah Gus Dur (PKB) relative baik karena mendapatkan legitimasi yang besar, yaitu terpilihnya menjadi presiden didukung oleh “poros tengah” yang dikomandani oleh Amien Rais. Tetapi disayangkan legitimasi yang kuat ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, malahann Gus

		partai politik sampai daerah-daerah, dengan demikian perhatian rakyat pedesaan dialihkan pada usaha pembangunan nasional.	Dur dengan percaya dirinya yang berlebihan membuat agak sedikit arogan dalam mengemudikan pemerintahannya. <i>Kapabilitas Regulatif pemerintah Megawati:</i> Kapabilitass regulative pemerintah Megawati juga ternyata tidal lebih baik. Artinya kondisi nya sama dengan Gus Dur. <i>Kapabilitas Regulatif pemerintah SBY-JK:</i> Dinilai masih lemah, karena masih menguatnya tindakan kekerasan dikalangan masyarakat, perilaku individu dan kelompok juga sering tak terkendali nuntuk melakukan kekerasan terhadap individu dan kelompok lain yang dianggapnya tidak sehaluan. <i>Kapabilitas Regulatif SBY-Boediono:</i> Tingkat kapabilitas regulatifnya kelihan mulai membaik, karena perilaku individu atau kelompok di dalam
--	--	--	---

			menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah maupun terhadap kelompok lainnya sudah terkendali untuk tidak melakukan tindakan kekerasan.
5	Kapabilitas Responsif	Karena rezim Orba yang bersifat otoritarianisme maka dalam kapabilitas responsive dapat dikatakan palling buruk, Karena sumber <i>input</i> yang datangnya dari masyarakat kurang mendapat perhatian.	<i>Kapabilitas Responsif Era Reformasi</i> Tingkat kapabilitas responsive kelima presiden pada orde reformasi dapat dikatakan yang relatife lebih baik ketimbang massa ORBA, yaitu <i>Input</i> -nya lebih banyak disuplai darri segelintir elite politik, elite teknokrat, birokrassi dan kalangan militer.
6	Kapabilitas Dalam dan Luar Negeri	Boleh dikatakan kapabilitas dalam dan luar negeri system politik rezim ORBA terutama pada resesi begitu lemah, hal ini dapat dilihat dari indikatornya antara lain: 1. Melakukan regulasi dengan mengalihkan negara sebagai peran penentu kebijakan dan sebagainya. 2. Ketidakmampuan system politik menghadapi tekanan global terutama	<i>Kapabilitas Dalam dan Luar Negeri Era Reformasi</i> Tingkat kapabilitass dalam dan luar neggeri kelima presiden pada era reformassi dapat dikatakn kondisinya sama persis dengan massa ORBA, yakni relative masih lemah didalam menghadapi lingkungan internasional.

		yang mengarah pada pelaksanaan liberalisasi ekonomi melalui liberalisasi perdagangan dan keuangan, melakukan privitalisasi terhadap perusahaan milik public.	
--	--	---	--

BAB III

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Kapabilitas sistem politik adalah kemampuan sistem politik dalam menghadapi tantangan, dinamika dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu Negara. Terdapat 6 kapabilitas sistem politik, yaitu: Kapabilitas Ekstraktif, yakni yang menyangkut sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Kapabilitas Distributif, yakni kemampuan sistem politik dalam membagikan sumber daya alam dan sumber daya manusia tersebut ke seluruh wilayah nasional dengan seadil-adilnya. Kapabilitas Regulatif, yakni dalam pembuatan peraturan-peraturan dari tingkat tertinggi sampai tingkat yang terendah. Kapabilitas Responsif, yakni bagaimana tanggapan pemerintah dalam menghadapi tuntutan-tuntutan masyarakat. Kapabilitas Simbolik, yakni yang berkaitan dengan kharisma seorang pemimpin. Kapabilitas dalam negeri & Internasional, yakni bagaimana sistem politik dapat bertahan menghadapi dinamika dan tekanan-tekanan baik internal maupun eksternal.

Politik praktis luar negeri kita belum secara maksimal kita gunakan untuk melindungi para TKI yang bekerja di luar negeri dengan mengadakan perjanjian perlindungan dengan Negara-negara yang menjadi destinasi para TKI. Untuk masalah impor tersendiri, memang ini adalah masalah yang sangat sulit untuk kita lepas dari ketergantungan impor ini, karena Indonesia menganut perdagangan bebas yang memperbolehkan barang barang dari luar negeri untuk masuk keIndonesia, yang membuat barang-barang buatan Indonesia menjadi sepi peminat. Mengurangi impor dan memupuk rasa bangga menggunakan barang-barang buatan dalam negeri harus ditanamkan sejak dini.

3.2.SARAN

Suatu sistem politik harus memiliki kapabilitas dalam menghadapi kenyataan dan tantangan terhadapnya. Pada era modern ini prestasi sistem politik di ukur dari kemampuannya melakukan penyelesaian dalam menghadapi masalah bangsa, dan tantangannya. Atau lebih berorientasi pada hal yang bersifat nyata (riil), seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, politik dan lainnya. Pembangunan ekonomi yang terus bergeliat haruslah di imbangi dengan kondisi masyarakat yang mendapatkan perlakuan adil secara hukum karena menciptakan masyarakat yang sejahtera harus juga memperhatikan hak antar sesamanya.

Sebagai mahasiswa sekaligus warga negara Indonesia kita harus menanamkan kesadaran diri dengan aturan-aturan yang berlaku di negara kita sesuai UU, ikut serta membantu pemerintah dalam perekonomian dan kemajuan bangsa, memahami dari ke enam kapabilitas dengan menuntut ilmu agar menjadi agen of change dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia begitupun dengan pemerintah untuk meningkatkan kepekaan terhadap masyarakatnya terkhusus penderitaan bagi masyarakat miskin. Terima kasih

DAFTAR PUSTAKA

1. Almond, Gabriel and James S. Coleman. (1960). *The Politics of Developing Area*. Princeton: Princeton University Press.
2. Beddy Iriawan Maksudi. 2017. *Sistem Politik Indonesia: pemahaman secara teoretik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers
3. Isjwara, F. 1982. *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Binacipta. Cetakan Ke 8
4. Kantaprawira, Rusadi.1988. *Sistem Politik Indonesia*. Sinar Baru. Cetakan Ke5
5. Pito, Toni Adrianus.dkk 2006. *Pengenalan Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Banda Aceh: Nuansa Cendikia
6. Yantos. 2014. *Sistem Politik Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam